

TARGET KUNJUNGAN WISATAWAN KE SUMATERA BARAT

Sejumlah badut menyambut wisatawan di Istana Basa Pagaruyung, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis (22/6). Dinas Pariwisata Sumatera Barat melalui program Visit Beautiful West Sumatera (WBWS) 2023 menargetkan sebanyak 8,2 juta wisatawan nusantara dan mancanegara datang berkunjung ke Sumatera Barat.



FOTO: ANTARA

AKTOR INTELEKTUALNYA DIBIDIK

Oknum Pegawai PT Pos Diduga Sunat Dana PKH untuk Ribuan Warga Miskin

Pemotongan dana bantuan PKH diduga dilakukan oleh oknum pegawai Kantor Pos bekerja sama dengan oknum Pendamping PKH. Total dana bantuan PKH yang disunat mencapai ratusan juta rupiah.

PANDEGLANG (IM)

Oknum pegawai Kantor Pos Pandeglang diduga menyunat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) untuk ribuan keluarga miskin di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program PKH dibuat sebagai upaya percepatan pengurangan kemiskinan. Namun, bantuan PKH berupa uang yang disalurkan melalui Kantor Pos tidak utuh. Uang

yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat lebih kecil dibandingkan jumlah uang yang disalurkan.

Pemotongan dana bantuan PKH diduga dilakukan oleh oknum pegawai Kantor Pos bekerja sama dengan oknum Pendamping PKH.

Pemotongan dana bantuan PKH ini terungkap saat warga penerima manfaat dari enam Desa di Kecamatan Mandalawangi mengeluh.

Jumlah pemotongan bervariasi. Dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Jika ditotal, dana bantuan PKH yang disunat mencapai

ratusan juta rupiah.

Pembina Keluarga Mahasiswa Mandalawangi (Kemangi), Ahmad Sopian, mengatakan bahwa kabar tentang pemotongan dana bantuan PKH itu setelah ada informasi dari KPM penerima PKH.

"Bahwa mereka menerima dana PKH tidak utuh saat pencairan di Kantor Pos Mandalawangi. Terus kami cek ke lapangan dengan meminta keterangan KPM," katanya, Jumat (23/6).

Sopian meminta agar kasus dugaan pemotongan dana PKH diselesaikan secara hukum maupun administratif. Serta, meminta agar hasil pemotongan dikembalikan kepada KPM.

"Kami meminta pelaku pemotongan PKH diproses hukum," katanya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengatakan, pihaknya sudah menindak-

lanjuti dugaan pemotongan dana PKH tersebut.

"Kita tidak lanjut dengan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi permasalahan program bantuan PKH di Mandalawangi. Pertama yang saya undang dari Inspektorat, kemudian pihak PT Pos, yang ketiganya Kecamatan dan Desa," katanya.

"Terus sama pendamping, Forkab, Forcam sama pendamping Mandalawangi juga tim 11 orang melakukan verifikasi ingin meng-clearkan antara data saya verifikasi dengan punya PT Pos berapa orang, agar segera dikembalikan kepada yang berhak karena mereka di sana butuh itu," katanya.

Pihak PT Pos menyatakan kesanggupan menyelesaikan dan mengembalikan. Dengan waktunya ditargetkan hari Minggu. "Kalau tidak dikembalikan ya proses hukum itu mah berjalan," katanya.

Sementara itu, oknum pegawai Kantor Pos Pandeglang yang diduga menyunat dana PKH, Dasan, mengaku akan mengembalikan dana bantuan tersebut.

"Saya akan mengembalikan secepatnya. Hari Minggu besok," katanya.

Kepala Seksi Intelijen, Kejari Pandeglang, Wildani Hapit menyatakan, dugaan kasus pemotongan dana bantuan KPM oleh oknum PT Pos bersama pendamping PKH tengah ditangani.

"Kita sudah klarifikasi pihak-pihak terkait untuk diminta keterangan dan untuk langkah selanjutnya kita akan ke lapangan," katanya.

"Minggu depan kita sudah bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Sementara ini kita sudah minta klarifikasi dari pihak pendamping, terus dari Dinas Sosial juga dan dari pihak PT Pos," katanya. • pra

Bupati Gianyar: Perpustakaan Nawaksara Akan Menjadi Tonggak Kemajuan Pembangunan Daerah

KAB.GIANYAR, BALI (IM)

Perpustakaan Nawaksara. Demikian nama yang disematkan Bupati Gianyar, I Made Mahayatra ketika meresmikan perpustakaan umum daerah Gianyar bersama Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, Jumat, (23/6).

Nawa berarti sembilan, dan aksara artinya huruf (aksara). Nawa jika dikaitkan dengan sejarah, adalah sikap penegeasan dan tanggung jawab Bung Karno di hadapan sidang MPRS atas pembangunan yang telah dilakukan.

"Perpustakaan umum Nawaksara saya yakinkan akan menjadi tonggak kemajuan pembangunan daerah," ujar Bupati Gianyar, I Made Mahayatra.

Keseriusan Bupati bukan tanpa alasan disampaikan karena sedari awal perencanaan hingga proses pembangunan perpustakaan, ia mengaku terus terlibat. "Saya serius ingin membangun sumber daya manusia Gianyar, tambah Made. Made kembali mengisahkan ketika di masa tahun 90-an, perpustakaan yang ia datangi selalu dalam kondisi sepi dengan koleksi buku yang apa adanya. Seiring waktu, kini Gianyar tumbuh dengan perekonomian yang bagus, infrastruktur membaik.

Bupati menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan memang sudah menjadi fokus pembangunan para pemimpin



Kepala Perpustakaan, Muhammad Syarif Bando (kiri) turut serta dalam prosesi peresmian Perpustakaan Nawaksara.

pusat dan daerah, namun jangan sampai melewatkan pembangunan SDM.

Perpustakaan Nawaksara berdiri di atas lahan seluas 883 meter persegi. Dibangun setinggi tiga lantai menggunakan dana alokasi khusus (DAK) 2022 senilai Rp8,3 miliar, sejumlah fasilitas mumpuni melekat di dalamnya, seperti fasilitas ruang baca anak, ruang baca difabel dan lansia, alat peraga, area internet, ruang deposit, serta ruang pameran. Bahkan, Nawaksara digadag-gadag juga sebagai tempat baca lontar, naskah sejarah masyarakat Bali.

"Masyarakat harus tahu sejarah. Masyarakat harus tahu pengetahuan karena kita tidak

bisa lepas dari pengetahuan," pesan Bupati.

Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengakui Gianyar beruntung punya pemimpin peduli dengan masyarakat. Sosok yang mau kerja keras mendorong kemajuan masyarakatnya.

"Komitmen bupati telah melahirkan perpustakaan umum. Karena upaya mencerdaskan anak bangsa sesuai yang tertulis undang-undang telah menjadi tugas kolektif," imbuh Syarif Bando.

Sementara itu, pada kesempatan talk show Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM), Bunda Literasi Gianyar yang baru dikuku-

hkan, Ida Ayu Ketut Surya Adnyani, mengatakan literasi merupakan proses pembelajaran bagi semua kalangan. Di negara-negara maju, membaca justru dijadikan budaya. Sedangkan, di Indonesia belum nampak jelas terlihat.

"Ini tentu bagian dari tugas bunda literasi untuk mengenalkan, membiasakan membaca sebagai aktivitas sehari-hari di lingkungan keluarga," ujarnya.

Massifnya program gerakan literasi yang dilakukan Perpustakaan bersama perpustakaan daerah diapresiasi Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di London, Khoiril Munadi.

Di Inggris, tambah Khoiril, peran perpustakaan

wilayah malah sentral sekali. Secara umum, perpustakaan wilayah di Inggris berkewajiban memberikan akses informasi yang luas dan gratis, memberikan program pengembangan keterampilan, menunjang kemampuan literasi digital warganya, serta sebagai pusat komunitas (*community center*) berupa ruang terbuka non inklusif.

"Ini serupa dengan yang dilakoni perpustakaan umum di Indonesia," tambahnya.

Pada kesempatan akhir, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan, Adin Bondar, menjelaskan konsep literasi untuk kesejahteraan melahirkan paradigma baru perpustakaan. Di mana perpustakaan tidak lagi berkaitan dengan manajemen koleksi, tapi justru mengembangkan kemampuan dan kualitas SDM.

Namun, di sisi lain Adin menyayangkan karena masih banyak kebijakan pemerintah daerah yang belum berpihak pada pembangunan SDM. Mereka merasa fokus tersebut belum sesuatu yang esensial. Padahal, di belakang majunya pembangunan sejumlah negara-negara hebat karena ditopang oleh budaya literasi yang kuat. Meski pun negara-negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. "Literasi akan membentuk masyarakat berpengetahuan, percaya diri, dan bahagia," ungkap Adin. • bam

KPU Kab.Tangerang Tetapkan Jumlah DPT Sebanyak 2,3 Juta Pemilih

TANGERANG (IM)

Komisari Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Banten telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 2.353.825 orang pemilih tersebar di 29 kecamatan di daerah itu.

Komisiner sekaligus Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU

Kabupaten Tangerang, Endi Rohendi Biaro di Tangerang, Jumat (23/6), mengatakan bahwa jumlah DPT tersebut merupakan hasil rekapitulasi untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

Menurut dia, jumlah pemilih di Kabupaten Tangerang sebanyak 2.353.825 pemilih itu terbagi pemilih laki-laki berjumlah 1.188.969 orang

dan pemilih perempuan 1.164.856 orang.

"Total ada 2.353.825 pemilih. Sementara untuk pemilih laki-laki berjumlah 1.188.969. Sedangkan untuk jumlah pemilih perempuan berjumlah 1.164.856 pemilih," katanya.

Dalam Pemilu 2024 mendatang, KPU menyebut terdapat 9.016 tempat pemung-

utan suara (IPS) yang tersebar di 274 desa/kelurahan.

Selain itu, kata Endi, KPU juga mengapresiasi atas kinerja PPK dan PPS, terutama Pokja Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilihan) yang telah bekerja keras menginput data dan memverifikasi data.

"KPU juga mengapresiasi Bawaslu, Parpol dan warga yang memberi masukan untuk

perbaikan DPT," ujarnya.

Ia menambahkan, KPU Kabupaten Tangerang memastikan data dinamis akan terus dipantau terutama pada pemilih baru, pensiunan TNI/Polri, dan warga yang wafat.

"Terutama pemilih baru, pensiunan TNI/Polri, dan warga yang wafat," kata dia. • pra

Ada 74 Temuan BPK di APBD 2022 Pemkot Tangsel

TANGSEL (IM)

Fraksi Gerindra-PAN DPRD Tangsel mengungkapkan ada 74 temuan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap APBD 2022 milik Pemkot Tangsel.

Bahkan, 74 temuan yang dilaporkan BPK RI belum ditindaklanjuti sampai saat ini. DPRD Tangsel meminta Pemkot Tangsel untuk terbuka atas 74 temuan BPK RI tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra-PAN, Ahmad Syawqi dalam pandangan umum rapat paripurna pekan lalu mengatakan, salah satu yang diketahui pihaknya misalnya pada belanja daerah.

BPK RI menyebut ada lima temuan di antaranya, pengadaan jasa konsultasi perencanaan pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Tangsel yang tidak sesuai ketentuan.

Kemudian pelaksanaan pengadaan dua paket jasa konsultasi pada Satpol PP Tangsel tidak sesuai, pembangunan enam unit gedung dan bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp3,397 miliar.

Pekerjaan penangananan kawasan kumuh Kecamatan Pondok Aren pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp 626 juta, sembilan paket pekerjaan jalan, pedestrian, turap dan saluran drainase pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina

Konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp967 juta.

Realisasi Belanja Dana BOS pada lima Satuan Pendidikan juga tidak sesuai dengan ketentuan.

"Berdasarkan temuan BPK RI tersebut, kami berpendapat bahwa terdapat beberapa persoalan dalam Belanja Daerah di APBD tahun 2022 ini," ungkapnya.

Sementara pada sisi aset yang dilaporkan BPK RI juga ditemukan piutang PBB-P2 ditetapkan atas Fasos-Fasum Pemkot Tangsel Rp 129 juta, penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai sehingga terdapat potensi salah saji piutang atas 50 NOP senilai Rp5,3 miliar.

"Atas hal tersebut kami patut mempertanyakan temuan apa saja 74 temuan yang belum ditindaklanjuti tersebut serta kenapa Pemkot Tangsel belum menindaklanjuti temuan tersebut," jelasnya.

Sementara itu Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menjelaskan 74 temuan BPK RI pada APBD 2022 yang belum ditindaklanjuti oleh Pemkot Tangsel terdiri atas 42 rekomendasi dari pemeriksaan kepatuhan atas manajemen aset dan 32 rekomendasi dari pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaan sampah rumah tangga.

"Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diunggah dalam aplikasi E Auditee milik BPK-RI," jelas Benyamin. • pp



FOTO: ANT

HARI PASARAN SAPI BEKONANG

Pembeli mengamati sapi yang dijual pedagang saat hari pasaran di Pasar Bekonang, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (23/6). Aktivitas jual beli ternak sapi setempat digelar setiap Hari Kliwon dalam penanggalan Jawa dan menjadi salah satu lokasi yang banyak diminati pembeli sapi untuk hewan kurban.

DPUPR Pandeglang Bangun Sanitasi untuk 951 Keluarga

PANDEGLANG (IM)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang membangun sanitasi 951 keluarga pra sejahtera di sembilan kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

Pembangunan sanitasi berupa septic tank dilaksanakan di 17 desa dan dua kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

Kepala Bidang Cipta Karya pada DPUPR Kabupaten Pandeglang Dede Lesmana mengatakan, biaya pembangunan sanitasi bersumber dari DAK tahun Anggaran 2023.

"Program bantuan ini untuk 951 keluarga penerima manfaat. Yang tersebar di 17 desa dan dua kelurahan di sembilan kecamatan di Kabupaten Pandeglang," katanya, Jumat (23/6).

Bantuan sanitasi berupa pembangunan septic tank yang setiap desa dan kelurahan mencakup 50 sambungan rumah. Dengan proses pengerjaan dilaksanakan secara swadaya yakni oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM).

"Program bantuan sanitasi ini untuk meningkatkan kinerja sarana dan prasarana bidang infrastruktur. Serta meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," katanya.

Program bantuan ke-

sehatan ini dalam rangka menuju 100 persen akses sanitasi terpenuhi. Dengan target pengerjaan ditargetkan akan selesai lima sampai enam bulan kedepan.

"Untuk pembangunan akan dimulai dari bulan Juli 2023 mendatang. Adapun besaran bantuan yang akan diberikan berupa septic tank senilai Rp190 juta rupiah dan berupa uang Rp150 juta rupiah setiap desa dan kelurahan," katanya.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, program bantuan sanitasi bagian dari upaya menekan angka stunting, beberapa masyarakat pra sejahtera.

"Bantuan sanitasi ini tidak lain agar pola hidup sehat dapat diterapkan sehingga angka stunting terus menurun. Serta menerapkan perilaku hidup sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," katanya.

Irna menjelaskan, bahwasanya menurunkan angka stunting merupakan tugas semua pihak. Bukan hanya bidang kesehatan, melainkan semua stakeholder dan juga masyarakat.

"Menjalani Hidup sehat tentunya diawali dari rumah tangga terkecil dulu yaitu lingkungan keluarga. Semoga bantuan ini memberikan stimulus untuk masyarakat agar dapat membiasakan hidup bersih dan sehat," katanya. • pra